

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu penghambat dalam era globalisasi. Manusia yang memiliki kualitas rendah akan sulit untuk bersaing dan tidak menutup kemungkinan mereka akan tertinggal oleh kemajuan teknologi di segala aspek kehidupan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Bank Dunia tahun 2018 tentang Index Sumber Daya Manusia (*Human Capital Index/HCI*), Indonesia menempati posisi ke 87 dari 157 negara. Terkait posisi itu, Indonesia memperoleh skor sebesar 0,53. Arti dari skor 0,53 itu ialah bahwa setiap anak yang lahir di Indonesia hari ini memiliki 53 persen kesempatan untuk bisa bertumbuh, dengan catatan ia menyelesaikan pendidikannya dan memiliki akses penuh terhadap kesehatan. Untuk itu, Bank Dunia mendorong sudah semestinya pemerintah memiliki rencana jangka panjang dan komitmen untuk berinvestasi pada sumber daya manusia.

Sistem manajemen merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas SDM. Manajemen sumber daya manusia adalah proses yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada digunakan secara efektif dalam usaha mencapai tujuan organisasi atau perusahaan serta tujuan individu (Newman & Hodgetts, 1998: 4).

Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan. Manajemen Sumber daya manusia menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangankaryawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik (Simamora, 2004: 4).

Sistem manajemen SDM menjadi perlu untuk dilakukan dalam dunia pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu di bidang pendidikan karena pembangunan di segala bidang akan ditunjang oleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, pendidikan perlu mendapat perhatian yang besar agar bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu faktor yang memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan adalah guru. Sebagaimana pendapat Shoimin (2013: 81) bahwa guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sementara Sardiman (2007: 133) berpendapat bahwa guru profesional harus memiliki persepsi filosofis dan ketanggapan yang bijaksana agar lebih mantap dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya.

Permasalahan guru di Indonesia secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan keprofesionalannya yang masih belum memadai. Padahal kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional. Oleh sebab itu maka permasalahan yang terjadi pada guru perlu diselesaikan secara komprehensif baik menyangkut kualifikasi, kesejahteraan maupun perlindungannya.

Berdasarkan data UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2016, pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang dan kualitas guru menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Jumlah guru mengalami peningkatan sebanyak 382% sejak 1999/2000 menjadi sebanyak 3,9 juta orang sedangkan peningkatan jumlah peserta didik hanya 17%. Dari 3,9 juta guru yang ada, masih terdapat 25% guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% di antaranya belum memiliki sertifikat profesi.

Guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar perlu diujikan keprofesionalan mereka dalam Uji Kompetensi Guru (UKG). Kompetensi yang diujikan yaitu kompetensi pedagogik dan profesional guru. Kompetensi pedagogik yang dimaksud adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sedangkan kompetensi profesional yang dimaksud adalah kemampuan pendidik dalam

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru membimbing peserta didik untuk memperoleh kompetensi yang ditetapkan.

Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan terdapat tujuh provinsi mendapat nilai terbaik dalam Uji Kompetensi Guru yang dilaksanakan pada tahun 2015 secara nasional. Nilai yang diraih tersebut merupakan nilai yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55. Tujuh provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06).

Uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 menguji kompetensi guru untuk dua bidang yaitu pedagogik dan profesional. Rata-rata nasional hasil UKG 2015 untuk kedua bidang kompetensi itu adalah 53,02. Selain tujuh provinsi tersebut yang mendapatkan nilai sesuai standar kompetensi minimum (SKM), ada tiga provinsi yang mendapatkan nilai di atas rata-rata nasional, yaitu Kepulauan Riau (54,72), Sumatera Barat (54,68), dan Kalimantan Selatan (53,15).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, jika dirinci lagi untuk hasil UKG untuk kompetensi bidang pedagogik saja, rata-rata nasionalnya hanya 48,94, yakni berada di bawah standar kompetensi minimal (SKM), yaitu 55. Bahkan untuk bidang pedagogik ini, hanya ada satu provinsi yang nilainya di atas rata-rata nasional sekaligus mencapai SKM, yaitu DI Yogyakarta (56,91), itu artinya cara mengajar guru Indonesia masih kurang baik (Kementrian Pendidikan Kebudayaan: 2015).

Jika ingin mengembangkan profesionalisme guru juga diperlukan wadah kerja sama yang memberikan wewenang serta tersedianya waktu untuk mengadakan pertemuan dalam melaksanakan tugas profesional (mengajar). Kaitannya dengan pembinaan (supervisi), Musyawarah Guru Mata Pelajaran adalah supervisi kelas (pelaksanaan kegiatan belajar mengajar) yang dilaksanakan oleh guru inti (instruktur) dan merupakan bentuk pelaksanaan supervisi kesejawatan yang dilakukan secara kelompok dengan orientasi kolaboratif.

Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalisme guru. Salah satu yang diharapkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja mengajar yang dimiliki oleh guru adalah terdapatnya tempat musyawarah guru mata pelajaran termasuk di dalamnya musyawarah guru per mata pelajaran yang mempunyai tujuan sebagai wadah yang dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru (Anwar, 2011).

Melalui kegiatan MGMP, para guru akan mampu meningkatkan kemampuannya dalam proses pembelajaran. Segala bentuk kesulitan yang dihadapi di lapangan akan mudah untuk dicari solusinya dari guru peserta MGMP dan para pengawas. Dalam melaksanakan fungsinya, guru harus berinteraksi dengan guru lain yang terkait melalui suasana kemitraan yang bersifat sistematis, sinergik dan simbiotik. Demikian pula antardisiplin ilmu seharusnya saling berinteraksi dan bekerjasama dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul. Pendekatan interdisipliner dalam bentuk tim kerja merupakan suatu yang mutlak dan harus dijadikan landasan dalam kinerja guru.

Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang dibentuk sejak tahun 1984 dengan nama SPKG (Sanggar Peningkatan Kerja Guru) merupakan wadah kerja sama guru yang beranggotakan guru-guru mata pelajaran yang sama di tingkat sekolah, sub rayon maupun rayon kabupaten. Kegiatan MGMP sangat efektif untuk mengembangkan profesionalisme kegiatan belajar mengajar mulai dari persiapan sampai evaluasi termasuk mendiskusikan materi-materi sulit dan pemecahannya dengan prinsip “dari, oleh dan untuk semua anggota (guru)”. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan proses dan hasil belajar mengajar melalui kerja sama antarguru.

Berbagai program profesionalisme guru dirancang untuk meningkatkan hasil belajar siswa karena guru memiliki dampak terbesar pada pencapaian siswa (Swanson & Ritter, 2018: 642). Sebagai mana yang dinyatakan oleh Shuls (2016: 2) bahwa untuk meningkatkan prestasi siswa, pembuat kebijakan harus mencari kebijakan yang akan membantu meningkatkan kualitas profesi guru.

Hasil belajar peserta didik dapat diukur melalui kemampuan peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik yang mempunyai pengetahuan yang luas akan terlihat secara signifikan pada hasil belajar yang dicapai. Hal ini diperkuat oleh pendapat Winkel (1999) dalam Purwanto (2014: 39) yang mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Kenyataan yang ditemui di lapangan ialah kiprah MGMP khususnya MGMP tingkat SMA secara umum belum berjalan secara optimal sebagaimana yang

diharapkan. Bahkan di beberapa tempat khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi hal ini tidak berjalan sama sekali. Kenyataan ini dimungkinkan diakibatkan oleh adanya hambatan koordinasi antara pengurus MGMP tingkat SMA atau guru mata pelajaran itu sendiri dan kurangnya dukungan dari penentu kebijakan baik pada tingkat sekolah (Kepala Sekolah), Kabupaten/Kota (Dinas), Provinsi bahkan sampai tingkat pusat. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan kembali peranan MGMP tingkat SMA sebagai wadah koordinasi antara guru mata pelajaran di sekolah, program yang menunjang pengurus MGMP tingkat SMA menjadi sangat penting.

Pengamat pendidikan Prof. Arief Rachman menuturkan, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan forum MGMP tidak berjalan secara maksimal. Mulai dari faktor internal yang bisa muncul dari masing-masing guru sendiri. Kemudian juga bisa karena faktor eksternal yang dipengaruhi oleh struktur organisasi, hubungan dengan pemerintah daerah maupun pusat. Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO ini pun mendorong agar MGMP yang sudah berjalan efektif membantu MGMP lain yang belum berjalan secara optimal. Asas gotong-royong dan saling membantu antar MGMP inilah yang dinilai efektif meningkatkan mutu forum-forum MGMP (REPUBLIKA.co.id, 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka mendorong peneliti untuk mendapatkan data empirik tentang “Hubungan Keterlibatan dalam MGMP, Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru PPKn dengan Hasil Belajar Siswa SMAN Di Kota Malang”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Kualitas sumber daya manusia masih rendah untuk dapat bersaing di era globalisasi.
2. Permasalahan guru di Indonesia secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan profesionalisme guru yang masih belum memadai sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif baik menyangkut kualifikasi, kesejahteraan maupun perlindungan bagi guru.
3. Rata-rata nilai UKG (Uji Kompetensi Guru) dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2015 masih di bawah rata-rata yaitu pada angka 53 sementara standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 55.
4. Kiprah MGMP khususnya MGMP tingkat SMA secara umum belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Bahkan di beberapa tempat khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi hal ini tidak berjalan sama sekali.

## **C. Pembatasan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada permasalahan yang akan dikaji yaitu: hubungan keterlibatan dalam MGMP, kompetensi pedagogik dan profesional guru PPKn dengan hasil belajar siswa. Objek yang dipilih dalam kajian ini adalah guru PPKn yang menjadi anggota dalam MGMP PPKn SMA di Kota Malang.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah hubungan keterlibatan guru PPKn dalam MGMP dengan hasil belajar siswa SMAN di Kota Malang?
2. Adakah hubungan kompetensi pedagogik guru PPKn dengan hasil belajar siswa SMAN di Kota Malang?
3. Adakah hubungan kompetensi profesional guru PPKn dengan hasil belajar siswa SMAN di Kota Malang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan keterlibatan guru PPKn dalam MGMP dengan hasil belajar siswa SMAN di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui hubungan kompetensi pedagogik guru PPKn dengan hasil belajar siswa SMAN di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui hubungan kompetensi profesional guru PPKn dengan hasil belajar siswa SMAN di Kota Malang?

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam dunia pendidikan khususnya dalam upaya meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru PPKn melalui keterlibatan guru dalam MGMP PPKn serta

dapat dijadikan sebagai acuan dan pengembangan teori dalam penelitian sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Bagi peneliti, manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bekal nanti dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai tenaga pendidik, untuk bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau peserta didik.
- b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi guru untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga dapat memenuhi tugasnya untuk memberikan kualitas pengajaran yang baik dan melahirkan generasi-generasi masa depan dengan kualitas yang membanggakan.
- c. Bagi MGMP PPKn, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian mengenai evaluasi dan identifikasi kekurangan selama pelaksanaan program kegiatan dalam MGMP PPKn.
- d. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk meningkatkan hasil belajar PPKn siswa sehingga mampu menjadi generasi masa depan dengan kualitas yang membanggakan.